

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan tempat strategis untuk mengembangkan perekonomian suatu negara karena di dalamnya terdapat banyak potensi yang dapat dikembangkan. Pengelolaan potensi merupakan upaya dari pembangunan desa dimana hal tersebut memiliki peran besar dalam mendukung pembangunan nasional. Pembangunan desa dapat mencakup aspek yang luas, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat secara menyeluruh. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi tujuan utama dari segala upaya pembangunan yang dilaksanakan dan menjadi indikator yang penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan desa mampu memberikan dampak positif kepada masyarakat.²

Upaya peningkatan kesejahteraan menjadi hal penting yang harus dilakukan karena merupakan hak bagi setiap warga negara. Menurut Huraerah, kesejahteraan merupakan sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang bermasalah. Lebih lanjut, menurut Midgley, kesejahteraan merupakan kondisi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan

² Rukin, *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa, Sustainability (Switzerland)* (Sinar Grafika, 2021), hal.25

pendapatan dapat terpenuhi, serta ketika manusia memperoleh perlindungan dari resiko utama yang mengancam kehidupannya.³

Aspek yang umum digunakan sebagai indikator kesejahteraan adalah pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan daya beli dan kemakmuran ekonomi, populasi yang mencakup distribusi dan komposisi penduduk, akses kesehatan yang memadai, pendidikan yang layak, tersedianya lapangan pekerjaan, pola konsumsi yang layak, tempat tinggal yang layak huni, serta keberagaman sosial budaya yang mendukung interaksi yang harmonis dalam masyarakat.⁴ Kesejahteraan tersebut akan sulit tercapai tanpa adanya peran aktif pemerintah khususnya dalam membuat kebijakan yang dapat mendorong pengembangan desa secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Otonomi Daerah, sehingga banyak daerah yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk melakukan pengembangan pada daerahnya terutama mengembangkan desa, salah satunya adalah dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), suatu badan usaha yang modalnya baik seluruh maupun sebagian besar dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.⁵

³ A.Junaedi Karso, *'Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan Di Indonesia'* (Insania, 2021), hal.52

⁴ Dahliana Sukmasari, *'Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al- Qur ' an'*, *Journal of Quran and Hadis Studies*, 3.1 (2020), hal.4

⁵ Farida Yustina and Arif Purbantara, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Badan Usaha Milik Desa* (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019), hal.2

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus memperhatikan beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pada dasarnya pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa. Semakin besar potensi yang dimiliki oleh suatu desa, maka akan semakin besar pula peluang BUMDes untuk mengembangkan dan mengelolanya.⁶ Pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dengan beberapa prinsip yang meliputi profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.⁷

Dalam aktivitasnya, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan dalam bentuk keuangan, namun juga berfokus untuk mendorong kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan BUMDes secara lebih jelas tercantum dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yaitu meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan umum masyarakat, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

⁶ Hasanah and others, *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor* (UM Jakarta Press, 2022), hal.17

⁷ Suyanto Soeradi, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa* (2023), hal.10

desa, meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).⁸

Pada tahun 2014, terdapat 1.022 BUMDes yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Menurut data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, per November 2024 terdapat 55.343 BUM Desa dan 5.938 BUM Desa Bersama, dengan total keseluruhan BUM Desa secara nasional adalah 61.281. Dari jumlah tersebut, 21.096 BUM Desa dan 1.687 BUM Desa Bersama telah berbadan hukum.⁹ Di Provinsi Jawa Timur, per 31 Desember 2023, jumlah BUMDes telah mencapai 6.638 dengan 1.653 BUMDes klasifikasi maju, 2.489 BUMDes klasifikasi berkembang, dan 2.496 BUMDes dalam klasifikasi pemula.¹⁰

Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang terakhir diperbarui pada Juli 2024, jumlah BUMDes di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 telah mencapai 251. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1.1.

⁸ Farida Yustina dan Arif Purbantara, *Modul KKN Tematik Desa...*, hal.3

⁹ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, “BUM Desa dan BUM Desa Bersama nasional”, dalam <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>, diakses pada 23 November 2024

¹⁰ Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, “Resmikan Wisata Baru Desa Tumpak Selo, PJ. Gubernur Adhy Optimis Desa Jadi New Center of Growth Ekonomi Jatim”, dalam <https://dishut.jatimprov.go.id/portal/public/berita/291#:~:text=Berdasarkan%20data%20Desa%20Center%20Jawa,dan%202.496%20BUMDes%20klasifikasi%20pemula>, diakses pada 23 November 2024

Tabel 1. 1 Badan Usaha Milik Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2023

No	Kecamatan	Badan Usaha Milik Desa
1.	Besuki	10
2.	Bandung	18
3.	Pakel	13
4.	Campurdarat	9
5.	Tanggunggunung	7
6.	Kalidawir	17
7.	Pucanglaban	9
8.	Rejotangan	16
9.	Ngunut	18
10.	Sumbergempol	17
11.	Boyolangu	17
12.	Tulungagung	-
13.	Kedungwaru	19
14.	Ngantru	13
15.	Karangrejo	13
16.	Kauman	13
17.	Gondang	20
18.	Pagerwojo	11
19.	Sendang	11
Jumlah		251

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2024), diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, hanya terdapat satu kecamatan yang tidak memiliki BUMDes yaitu Kecamatan Tulungagung. Kecamatan dengan BUMDes terbanyak adalah Kecamatan Gondang yaitu memiliki 20 BUMDes, dan kecamatan dengan jumlah BUMDes paling sedikit adalah Kecamatan Tanggunggunung yaitu sebanyak 7 BUMDes.

Salah satu desa yang memiliki BUMDes di Kecamatan Boyolangu adalah Desa Kendalbulur. Merujuk pada ketersediaan beberapa fasilitas umum seperti jalan desa, ketersediaan air bersih, listrik, dan fasilitas pendidikan dasar, Desa Kendalbulur merupakan desa yang memiliki kondisi yang relatif baik. Namun, dalam konteks kesejahteraan masyarakat, masih menghadapi beberapa

tantangan. Mayoritas penduduk di Desa Kendalbulur masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian yang sifatnya musiman sehingga memiliki ketidakpastian pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor tersebut membuat masyarakat rentan terhadap faktor eksternal seperti cuaca maupun fluktuasi harga hasil panen. Pendirian BUMDes merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pengelolaan potensi ekonomi desa.

Berdasarkan wawancara awal dengan Ibu Dian selaku Sekretaris BUMDes Larasati, didapatkan hasil bahwa BUMDes Larasati memiliki 5 unit usaha yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Unit usaha tersebut meliputi simpan pinjam, pertanian, mina padi, wisata desa dan juga agen pembayaran *Payment Point Online Bank* (PPOB). Semua unit usaha yang dijalankan telah disesuaikan dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat membuat masyarakat lebih sejahtera. Namun, dalam menjalankan usahanya, BUMDes Larasati menghadapi beberapa tantangan.¹¹

Unit Usaha simpan pinjam yang didirikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan guna mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, saat ini tidak lagi memberikan pinjaman karena tingginya tingkat gagal bayar oleh masyarakat yang melakukan pinjaman. Ketidakmampuan masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran

¹¹ Wawancara dengan Ibu Dian Aulia Aswari, Sekretaris BUMDes Larasati, pada tanggal 22 November 2024

mengindikasikan bahwa beberapa masyarakat Desa Kendalbulur masih menghadapi tantangan dalam aspek kesejahteraan ekonomi.¹²

Unit usaha lain yang dikelola oleh BUMDes Larasati adalah wisata desa Nangkula Park. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bersama Ibu Dian selaku Sekretaris BUMDes Larasari, pada tahun 2021 ketika wisata Nangkula Park mulai beroperasi dan ramai pengunjung, perekonomian masyarakat khususnya yang berada di dekat Nangkula Park tampak mengalami peningkatan karena terciptanya peluang usaha bagi warga sekitar seperti pembukaan warung di sekitar lokasi wisata. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengunjung yang menurun drastis menyebabkan banyak usaha masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan terpaksa tutup.¹³ Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Desa Kendalbulur masih belum stabil dan belum sepenuhnya dapat dikelola secara berkelanjutan.

Untuk unit usaha *Payment Point Online Bank* (PPOB), berusaha untuk memberikan layanan transaksi keuangan yang sering dibutuhkan oleh masyarakat sehingga aksesnya lebih dekat dan mudah, mengingat lokasi Desa Kendalubur cukup jauh dengan beberapa layanan publik yang biasanya banyak terletak di pusat kota. Unit usaha pertanian daun yang ditanami pohon jeruk purut telah berhenti karena lokasinya terkena imbas proyek pembangunan jalan desa. Sedangkan unit usaha mina padi yang merupakan penggabungan tanaman

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

padi dan budidaya ikan, tidak sepenuhnya berjalan karena kurangnya tenaga kerja yang bisa mengelola.¹⁴

Meskipun dihadapkan pada banyak permasalahan, BUMDes Larasati tetap beroperasi hingga saat ini. Berdasarkan wawancara awal dengan Sekretaris BUMDes Larasati, sejak tahun 2020 BUMDes Larasati telah menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui unit usaha yang masih berjalan. Semua pendapatan BUMDes Larasati yang telah dipotong biaya operasional dan gaji pegawai, disalurkan kepada pemerintah desa untuk menambah PADes Kendalbulur yang berfungsi untuk pembiayaan berbagai program desa.¹⁵

Keberhasilan BUMDes tidak hanya bergantung pada unit usaha yang berjalan, tetapi juga pada pentingnya keterbukaan Informasi. Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan dan kondisi BUMDes secara jelas.¹⁶ Hal itu dapat membuka peluang bagi warga desa untuk ikut serta dalam program-program yang ditawarkan dan mendapatkan informasi mengenai lapangan pekerjaan, bantuan sosial, hingga kemudahan akses yang bisa digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. As'Adi dan Ansara tahun 2023 di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa transparansi serta akses informasi yang akurat, jelas dan dapat diakses publik menjadi prinsip penting dalam tata kelola BUMDes untuk mendorong partisipasi dan kepercayaan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ John Fresly Hutahayan, '*Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi & Kinerja Pelayanan Publik* (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)' (Deepublish Publisher, 2019), hal.63

masyarakat terhadap BUMDes sehingga BUMDes dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁷ Selanjutnya mengenai peningkatan kesejahteraan oleh BUMDes, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fitri Aeli Kadri, dkk pada tahun 2024 di Kutai Kartanegara, yang menunjukkan bahwa adanya BUMDes mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal serta menghadirkan layanan publik dan program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.¹⁸

Berdasarkan kedua penelitian tersebut dan berbagai studi lain tentang BUMDes menunjukkan bahwa penelitian mengenai BUMDes khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan. Namun sebagian besar hanya membahas satu atau dua aspek secara terpisah seperti pengelolaan layanan atau penciptaan lapangan kerja. Pada penelitian ini mengkaji kontribusi BUMDes secara lebih menyeluruh mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui empat fokus utama yaitu lapangan pekerjaan, kemudahan akses, manfaat sosial dan keterbukaan informasi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perspektif pemerintah desa dan pengelola BUMDes, tetapi juga berfokus pada respons, manfaat, pengalaman nyata dan perubahan yang dirasakan oleh masyarakat.

¹⁷ Moh.As'adi dan Ansari, "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, (2023)

¹⁸ Fitri Aeli Kadri dkk, "Urgensi Eksistensi BUMDes Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2024)

Merujuk pada konteks dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Larasati dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang diuraikan diatas, fokus dan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana BUMDes Larasati membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat di Desa Kendalbulur?
2. Bagaimana unit usaha yang dijalankan BUMDes Larasati dapat meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Desa kendalbulur?
3. Bagaimana manfaat sosial yang diberikan BUMDes Larasati kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Kendalbulur?
4. Bagaimana BUMDes Larasati memfasilitasi keterbukaan informasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kendalbulur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lapangan pekerjaan baru yang telah diciptakan BUMDes Larasari dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk mengetahui sejauh mana unit usaha yang dijalankan BUMDes Larasati dapat meningkatkan kemudahan akses terhadap layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Untuk mengetahui manfaat sosial yang telah diberikan BUMDes Larasari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mengetahui fasilitas keterbukaan informasi yang telah disediakan oleh BUMDes Larasati untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Kendalbulur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan serta digunakan sebagai referensi tentang kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Badan Usaha Milik Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi yang telah dilakukan BUMDes Larasati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai

bahan evaluasi dan masukan untuk pengembangan BUMDes di masa mendatang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang memiliki kontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan

c. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian lembaga ekonomi yang ada di desa seperti BUMDes dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik serupa.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pasal 117, disebutkan bahwa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁹

¹⁹ Suyanto Soeradi, *Sekilas Tentang Badan Usaha Milik Desa BUM Desa* (Sumbangsih Alumni Universitas Brawijaya, 2023), hal. 4

b. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Allardt, kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang meliputi kebutuhan material maupun non material.²⁰

2. Definisi Operasional

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bantuan, sumbangan atau hasil nyata yang diberikan oleh BUMDes. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis dan pembahasan mendalam tentang kontribusi yang telah diberikan oleh BUMDes Larasati dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat menurut Soetomo, dimana di dalamnya terdapat tiga komponen utama yaitu keadilan sosial yang lebih difokuskan pada pendidikan, akses terhadap layanan yang dibutuhkan, serta penduduk miskin. Kemudian keadilan ekonomi yang difokuskan pada pendapatan, serta keadilan demokrasi yang difokuskan pada keterbukaan informasi. Indikator-indikator tersebut akan digali lebih dalam melalui wawancara yang akan dilakukan dengan perangkat desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat penerima manfaat.

²⁰ Muhammad Alfa Taufiqi, Abdul Muhid, and Ali Nurdin, *Makna Kesejahteraan Bagi Pendakwah* (CV Adanu Abimata, 2024), hal.16

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan penelitian ini mengacu pada buku pedoman skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti membuat sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman. Urutan eksplorasi ini memuat hal-hal dalam keseluruhan pemeriksaan yang terdiri dari bagian awal, isi, dan bagian akhir penelitian. Adapun pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah terkait analisis kontribusi BUMDes Larasati dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir teoritis atau paradigmatis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan data yang berkaitan dengan judul yaitu analisis kontribusi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kendalbulur ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pemaparan mengenai penelaahan lebih dalam terkait data dan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan terkait analisis kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat desa ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memaparkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Pada bagian ini menunjukkan jawaban pada bagian permasalahan diatas yang berisi kesimpulan dan saran.